



# LAPORAN

Tahunan  
**2015**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah diberikan kekuatan untuk mengemban tugas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bojonegoro, dan telah terselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2015. Keterbukaan informasi sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi. Dengan keterbukaan akan terbangun kepercayaan. Kepercayaan yang tinggi antara rakyat dengan Badan Publik, akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang kredibilitasnya terakui.

Pemerintah Bojonegoro, mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan keterbukaan, telah banyak hal yang diimplementasikan, antara lain adalah dilakukannya kegiatan “**sobo pendopo**” yang dikemas dalam acara Dialog Interaktif, yakni dialog antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakatnya. Pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan mulai 14 Maret 2008 sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dibawah kepemimpinan **Kang Yoto-Kang Hartono**. Keterbukaan pemerintahan yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro telah memberikan inspirasi para penulis, salah satunya adalah *Otto Scharmer* dalam buku **Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economics** (by *C. Otto Scharmer and Katrin Kaufer, 2013*) dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat.

Keterbukaan pemerintahan dalam prosesnya tidak akan pernah berhenti, oleh karena itu, kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro, masih memerlukan berbagai masukan demi mengapai hal yang lebih baik. Untuk itu mohon dapatnya memberikan masukan yang konstruktif.

Demikian semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Bojonegoro dan daerah lain untuk dapat saling belajar. Sekian terimakasih. SALAM KETERBUKAAN.....

Bojonegoro, 31 Desember 2015

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kabupaten Bojonegoro  
Ketua,

**KUSNANDAKA TJATUR P.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670224 198602 1 001



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iv</b>
<b>Sekilas Bojonegoro .....</b>	<b>1</b>
<b>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bojonegoro .....</b>	<b>6</b>
1. Regulasi Pelayanan Informasi .....	6
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten dan SKPD .....	10
<b>Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....</b>	<b>13</b>
1. Sarana dan Prasarana .....	13
2. Anggaran PPID .....	21
3. Daftar Informasi Publik .....	22
4. Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaiannya .....	26
5. Sengketa Informasi Publik .....	32
<b>Kendala dan Pengembangan .....</b>	<b>33</b>
1. Kendala .....	33
2. Pengembangan/ Inovasi .....	34
3. Rencana Tindak/ Target Tahun 2016 .....	37
<b>Dokumen .....</b>	<b>38</b>
<b>Link Pemberitaan on-line .....</b>	<b>43</b>

**..... Keterbukaan akan membangun Kepercayaan**

**..... Merubah dari Pemerintahan EGO,, ke ECO adalah  
kunci Keterbukaan**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Penggunaan Lahan di Bojonegoro .....	1
Gambar	2	Pertumbuhan Ekonomi Bojonegoro .....	3
Gambar	3	Wilayah Kabupaten Bojonegoro .....	4
Gambar	4	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro .....	10
Gambar	5	Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro .....	11
Gambar	6	Desk Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Bojonegoro .....	14
Gambar	7	Sarana Penunjang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Bojonegoro .....	15
Gambar	8	Desk Layanan PPID SKPD Badan PKKD .....	16
Gambar	9	Desk Layanan PPID Dialog Publik .....	16
Gambar	10	Desk Layanan PPID Bulan Layanan Publik .....	17
Gambar	11	Desk Layanan <b>LAPOR!</b> .....	18
Gambar	12	Publikasi Layanan Informasi .....	19
Gambar	13	Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan-Layanan Aspirasi Pengaduan On-line Rakyat ( <b>SIAP_LAPOR!</b> ) ....	20
Gambar	14	Kerjasama Layanan Permohonan Informasi .....	21
Gambar	15	Layanan informasi DIP pada Web PPID .....	25
Gambar	16	Layanan Permohonan Informasi melalui <b>LAPOR!</b> .....	28
Gambar	17	Laju Tindak Lanjut Layanan Informasi Melalui <b>LAPOR!..</b> .....	29
Gambar	18	Topik Permohonan Informasi dan SKPD Terlapor Melalui <b>LAPOR!</b> .....	30
Gambar	19	Kepala Bagian perekonomian On-Air AYO MAS BRO ...	31
Gambar	20	MOU Bupati Bojonegoro dengan Bojonegoro Institut ...	34

## DAFTAR TABEL

Tabel	1	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kominfo .....	7
Tabel	2	Data PPID Kabupaten , SKPD dan BUMD .....	12
Tabel	3	Data DIP PPID Kabupaten, SKPD, BUMD, Badan Publik Lain .....	23
Tabel	4	Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk .....	26
Tabel	5	Rincian Pelayanan Informasi pada Desk layanan Permohonan Informasi .....	27



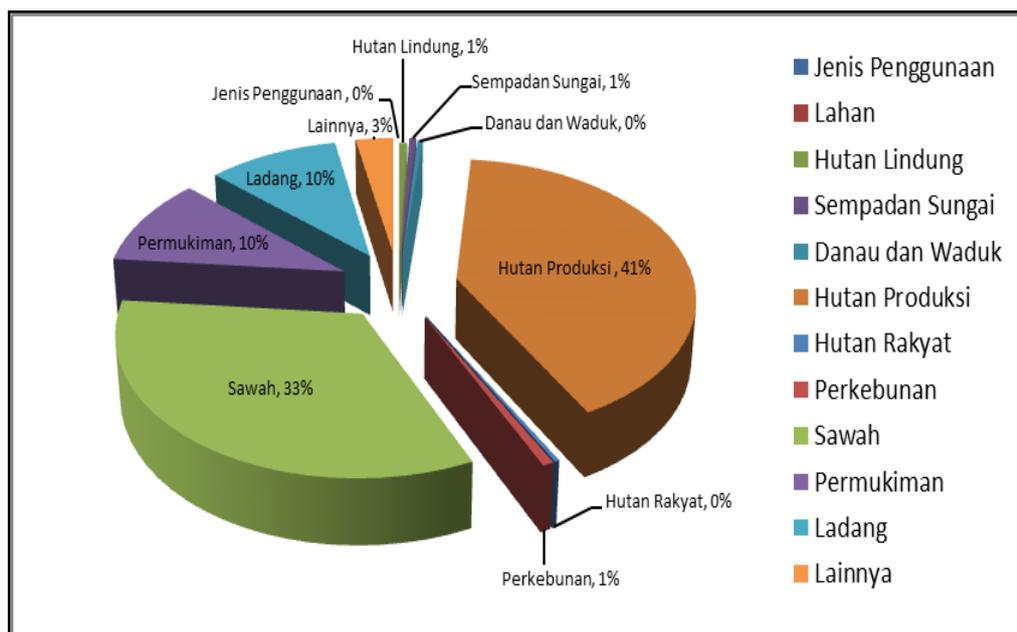
# Sekilas Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah yaitu mencapai 230.706 Ha, dimana 40,15% wilayah Bojonegoro merupakan wilayah hutan Negara yang sebagian besar berada di wilayah Selatan Bojonegoro, 32,58% berikutnya berupa lahan sawah yang sebagian besar berada di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo . Sebanyak 22,42% merupakan tanah kering dan sisanya 4,85% adalah perkebunan dan lain-lain. Wilayah kabupaten Bojonegoro memiliki batas,

- Sebelah Utara : Kabupaten Tuban
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang;
- Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah).

Secara administratif terbagi dalam 28 kecamatan, 419 desa dan 11 kelurahan.

Gambar 1  
Penggunaan Lahan di Bojonegoro



Secara Geografis, Kabupaten Bojonegoro dilalui oleh sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari selatan, menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur, di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro melewati 15 wilayah Kecamatan. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi pada musim penghujan, dan tembakau pada musim kemarau. Bagian selatan adalah pegunungan kapur, bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian barat laut (berbatasan dengan Jawa Tengah) adalah bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara.

Kabupaten Bojonegoro, juga sebagai daerah rawan bencana, yakni banjir sungai Bengawan Solo, banjir bandang di wilayah selatan, banjir genangan air dalam kota. Bencana lainnya adalah tanah longsor, hal ini terjadi karena sebagian besar pohon-pohon penahan tangkis kemiringan tanah banyak yang sudah tertebang disamping adanya percepatan hutan gundul. Angin kencang/puting beliung, kebakaran dan kekeringan juga merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, informasi serta merta sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait *early warning* kejadian bencana tersebut.

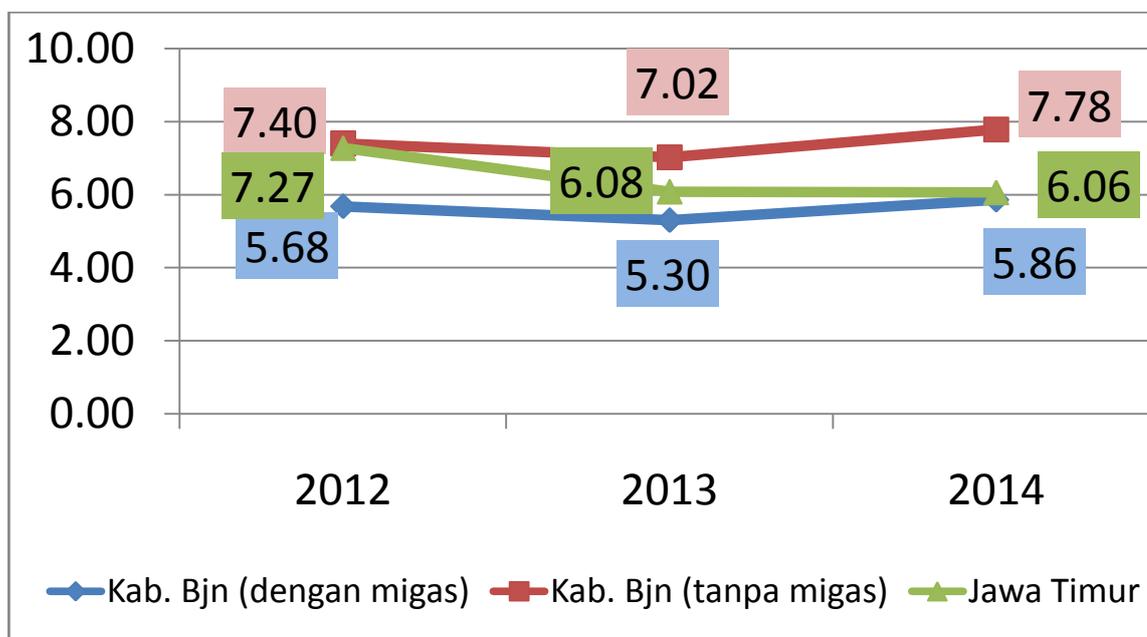
Bojonegoro juga memiliki potensi sumber daya alam, minyak dan gas bumi merupakan potensi penyumbang 20 % produksi nasional. Bojonegoro memiliki sejarah kemiskinan sejak jaman Belanda, oleh karenanya hingga saat sekarang kondisi tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan mata pencaharian, sebagian besar penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah petani (43,66 %), perdagangan (18,43 %), buruh (14,81 %), jasa (11,12 %), industri (10,24 %), PNS, TNI, POLRI, Pensiunan (1,71 %). Kondisi lingkungan yang demikian, telah membentuk karakter masyarakat Bojonegoro terkait keterbukaan, yakni selalu menginginkan informasi secara lengkap dan tuntas terhadap berbagai aktivitas yang ada di lingkungannya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas tahun 2014 tumbuh sebesar 5,86% kondisi tersebut mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2013 karena meningkatnya kinerja sektor pertanian, sektor

industri serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan Ekonomi juga dipengaruhi oleh keberadaan Proyek-proyek EPC migas yang sedang berlangsung yang secara langsung meningkatkan sektor konstruksi.

Gambar 2  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro

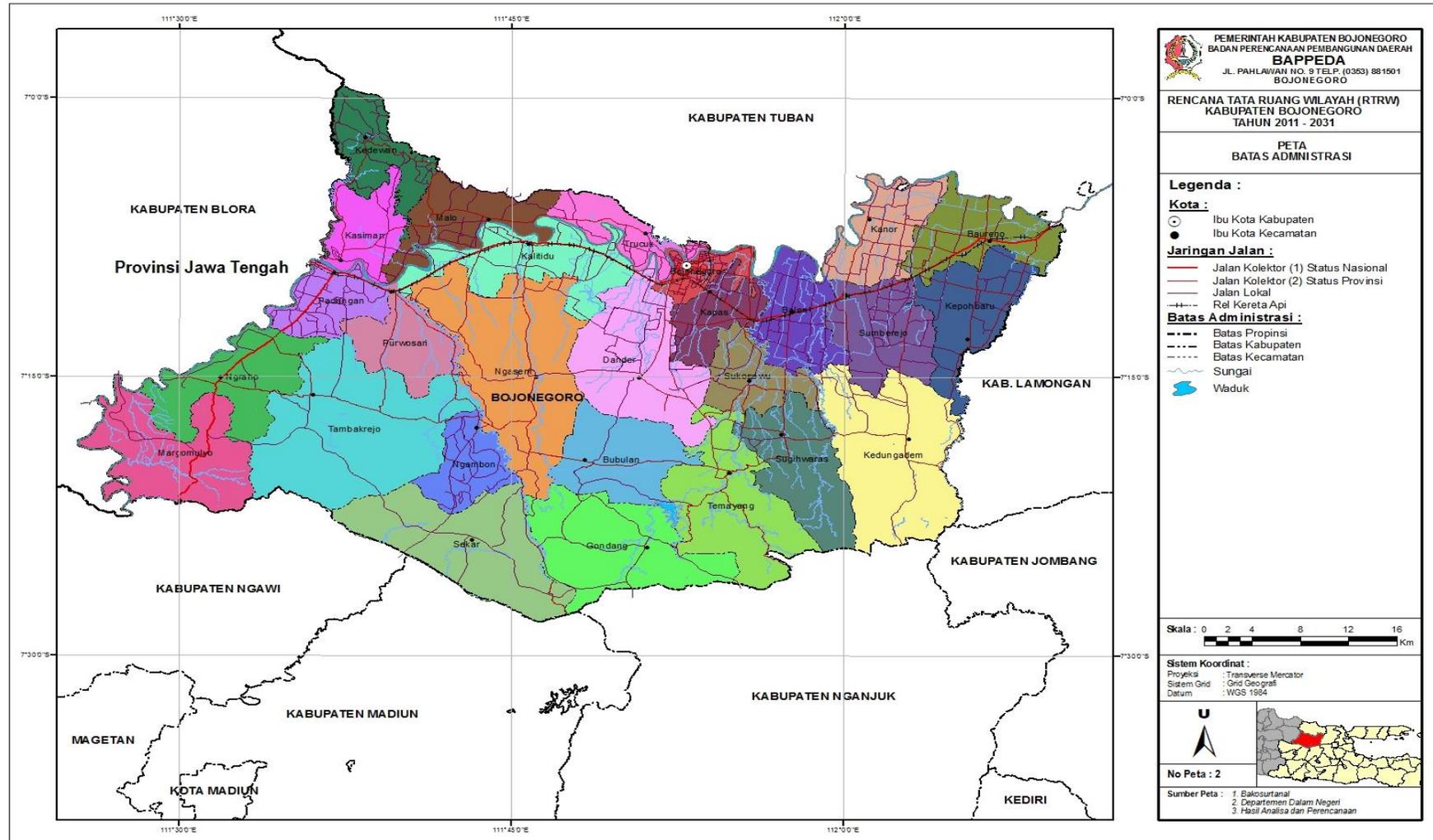


Permasalahan-permasalahan mendasar yang menjadi isu strategis adalah masalah infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan dan pertanian, tingkat kemiskinan masyarakat. Arah kebijakan untuk menjawab berbagai isu strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi pangan dan energi.
2. Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional.

Gambaran sekilas Kabupaten Bojonegoro tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap strategi implementasi keterbukaan informasi publik. Satu sisi masyarakat Bojonegoro merupakan masyarakat agraris, di sisi yang lain sedang tumbuh sebagai masyarakat industri dengan adanya sumber minyak dan gas bumi. Untuk itulah di awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro (kang Yoto-Kang Hartono), keterbukaan informasi publik merupakan spirit tata kelola pemerintahan Bojonegoro.

Gambar 3  
Wilayah Kabupaten Bojonegoro



Keterbukaan Informasi publik di Kabupaten Bojonegoro, telah dikembangkan sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomo 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2008. Keterbukaan informasi publik melalui “**Sobo Pendopo**” dalam bentuk kegiatan Dialog Publik, telah dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2008 hingga saat sekarang. Pelaksanaan dialog Publik di pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan secara rutin setiap hari Jum’at setelah Jum’at-an mulai pukul 13.00 sampai dengan selesai. Masyarakat secara terbuka datang dan menyampaikan informasi, pengaduan, keluhan dan aspirasi secara bebas kepada Bupati Bojonegoro beserta jajarannya, dan saat itu sekaligus diberikan tanggapan dan tindak lanjutnya. Identifikasi berbagai aspirasi dalam dialog publik, diinventarisasi menjadi salah satu input dalam perumusan kebijakan program kerja SKPD.

Disamping dialog publik, juga dikembangkan sarana aksesibilitas informasi, antara lain melalui SMS pada Radio Malowopati FM serta Forum Radio Bojonegoro (FRB), twitter, SMS Pimpinan, Whatapps, Layanan Aspirasi Pengaduan On-Line Rakyat (LAPOR), dan sebagainya. Tentunya dalam pengelolaan Keterbukaan informasi Publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten maupun SKPD dengan web PPID, <http://ppid.bojonegorokab.go.id/>

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan secara dialogis, distributive pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, telah menjadi kajian dari berbagai Perguruan Tinggi dan kajian penulisan karya tulis ilmiah dari para mahasiswa dan beberapa tulisan jurnalistik di berbagai media <https://www.youtube.com/watch?v=pmopn7LDt5s> . Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat, adalah salah satu perguruan tinggi internasional yang telah melakukan penelitian terkait keterbukaan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu oleh *Otto Scharmer* dalam buku **Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economics** (by *C. Otto Scharmer and Katrin Kaufer, 2013*). <https://www.youtube.com/watch?v=KymNWrL9ER8> ;



# PPID Bojonegoro

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kabupaten Bojonegoro sebagai pengelola kebijakan pelayanan informasi publik, dalam pelaksanaan tugasnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan informasi publik merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang dikelola oleh Badan Publik.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam implementasinya telah menuangkannya dalam RPJMD maupun Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai SKPD yang mengelola PPID kabupaten. Disamping itu pada seluruh SKPD telah ditetapkan penjabaran regulasinya. Berbagai dasar kebijakan tersebut merupakan pedoman dalam menetapkan strategi pencapaian target keterbukaan informasi publik, baik yang dilakukan oleh setiap SKPD yang tertuang dalam berbagai program kegiatannya maupun yang secara langsung dilaksanakan oleh PPID, yaitu kegiatan untuk mencapai target selama 5 (lima) tahun maupun tahunan yang tertuangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Renja Kerja (Renja) SKPD.

Penjabaran kebijakan pelayanan informasi publik, teruraikan dalam : (1) regulasi pelayanan informasi publik ; (2) PPID Kabupaten dan PPID SKPD.

## 1. Regulasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dengan **VISI** :  
**“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan**

**Energi Negeri yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan**”, dimana pada **MISI** yang ke-3: **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional”**, dengan sasaran meningkatnya : **“aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan”**. Adapun indikator terhadap sasaran tersebut yaitu :

- (1) persentase cakupan wilayah untuk pelayanan informasi pembangunan;
- (2) persentase layanan interaksi pengaduan secara online.

Berdasarkan RPJMD tersebut, maka Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro menjabarkan dalam visi: **“ Menjadi Dinas Komunikasi Dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal”**. Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan e-Government dan peningkatan profesionalisme pelayanan Pos dan Telekomunikasi
2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial dan kemitraan profesi.

Pada penjabaran Misi 2 : Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi **Tujuan 1** : Meningkatkan penyebaran informasi, dengan **Indikator** : Meningkatkan cakupan penyebaran informasi, dengan sasaran, sebagai berikut :

Tabel 1

**Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kominfo**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya KIM yang berbasis IT	Persentase peningkatan KIM berbasis IT
2.	Meningkatnya kemitraan profesi	Persentase peningkatan kemitraan profesi
3.	Meningkatnya eksistensi PPID	Persentase peningkatan PPID yang sesuai regulasi
4.	Terbangunnya sarana prasarana penyebaran informasi	Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebaran informasi
5.	Meningkatnya fungsi komunikasi dan informatika	Persentase peningkatan fungsi komunikasi dan informatika

Untuk rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, dijabarkan dalam strategi : **“meningkatkan diseminasi informasi secara berkala didukung oleh peningkatan sumber daya komunikasi dan informasi serta peningkatan kuantitas, dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT”**. Sedangkan kebijakannya adalah : Melaksanakan kemitraan publikasi informasi ke berbagai media serta melakukan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan kepada lembaga-lembaga layanan publik

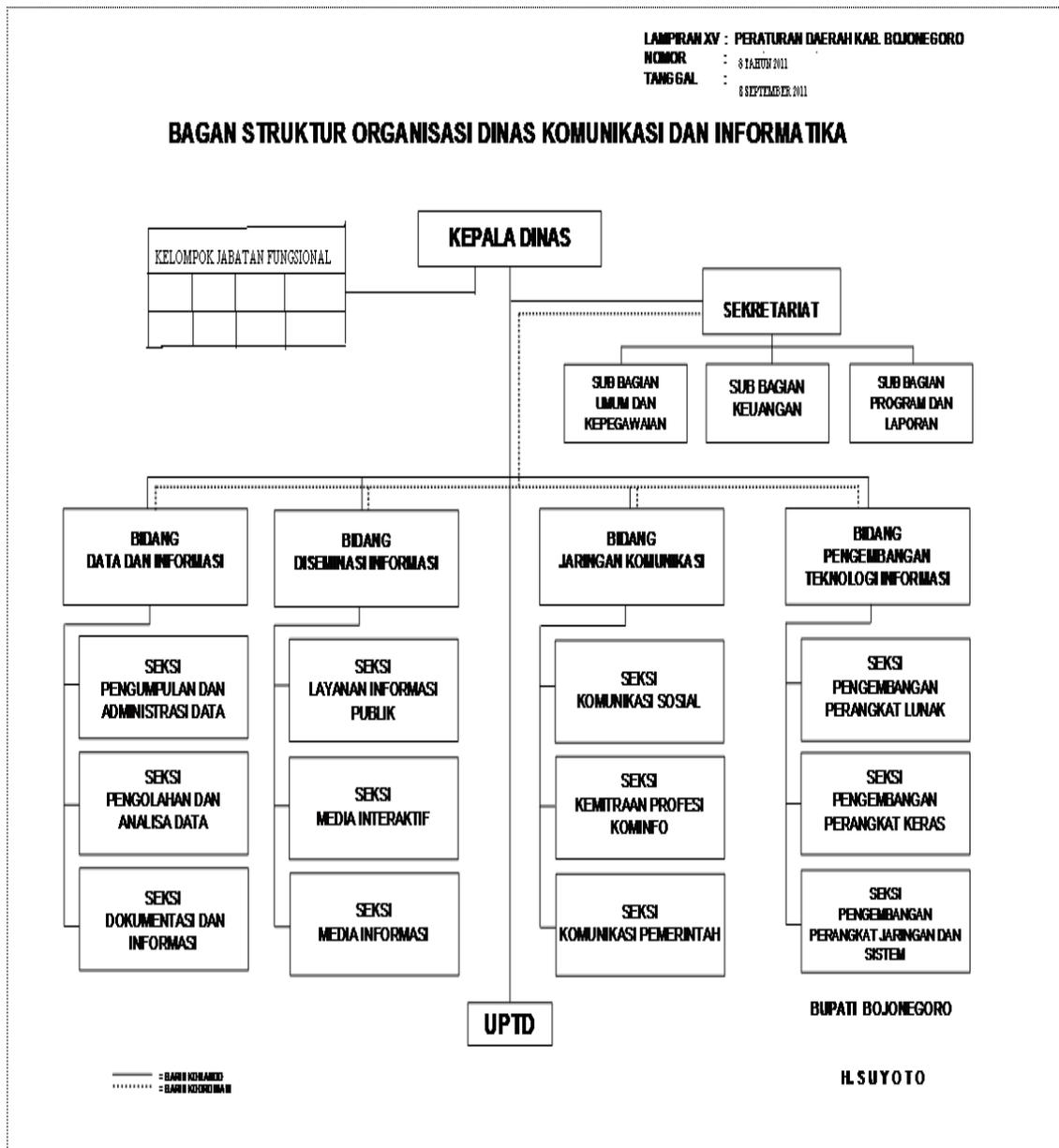
Mengacu pada kebijakan tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
- b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro.
- c. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- d. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (TKBP3).
- e. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/54/KEP/412.11/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- f. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/211/KEP/412.11/2014 tentang Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

- g. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/397/KEP/412.11/2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan(TKBP3) Daerah.
- h. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/234/KEP/412.11/2015 tentang Tim Transparasi Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro Periode 2015 – 2018.
- i. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/247/KEP/412.11/2015 tentang Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- j. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/037/412.45/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
- k. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/038/412.45/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Integrasi Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, Twitter Bupati dan Media Cetak Serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
- l. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/068/412.45/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 4  
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Bojonegoro



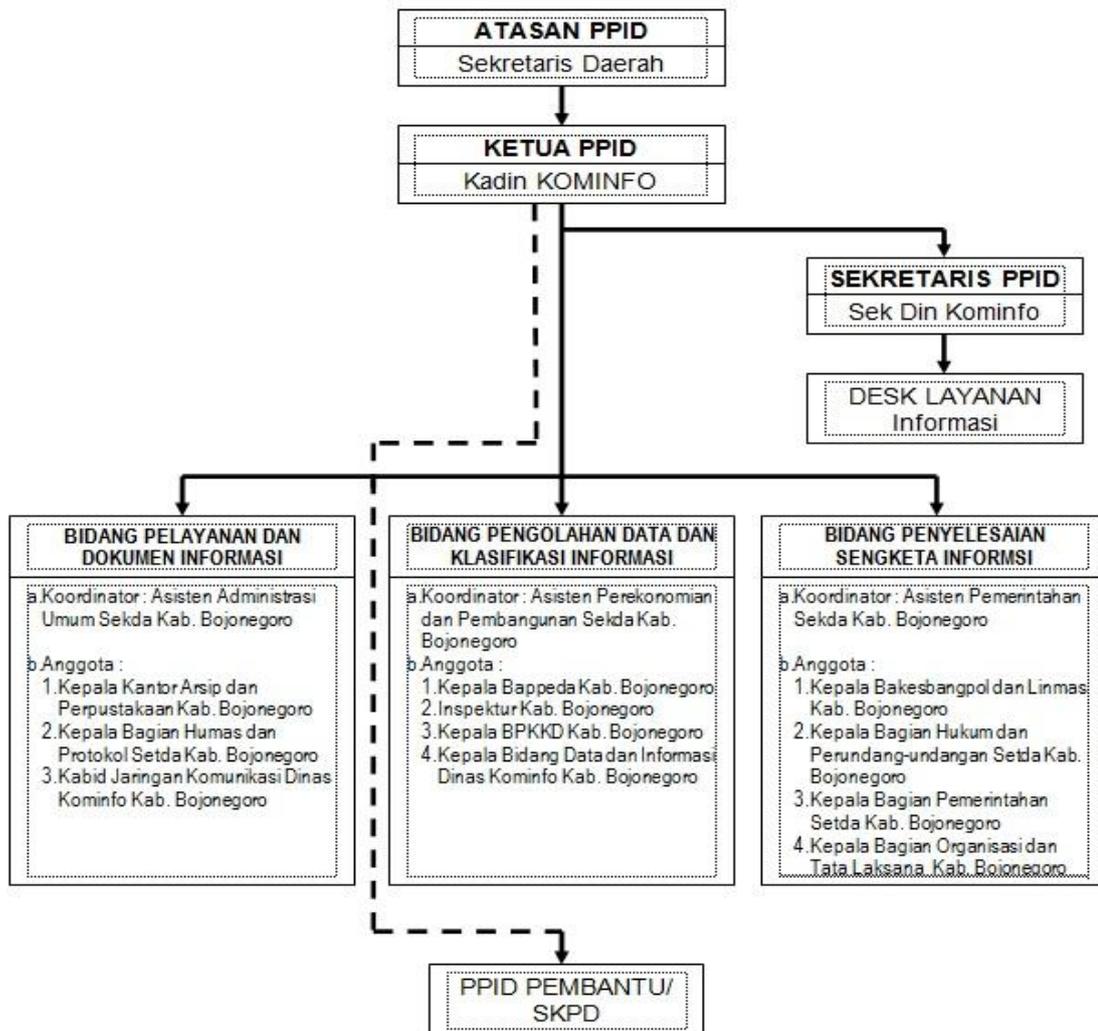
## 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, pada Bidang Jaringan Komunikasi Seksi Komunikasi Pemerintah. Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten

dan SKPD tertuang dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (terlampir). Untuk PPID Kabupaten menangani informasi dan dokumentasi Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah), Asisten Sekretaris Daerah dan bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID SKPD.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 5  
Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro



Data PPID Kabupaten dan PPID SKPD serta BUMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah terbentuk PPID, sebagai berikut :

Tabel 2  
Data PPID Kabupaten, SKPD dan BUMD

No.	URAIAN	JUMLAH				PERSONIL	KET.
		PPID	Ada	belum	SK		
1.	PPID Kabupaten	1	1		1	18	
2.	SKPD						
	a. Badan	9	9			46	
	b. Dinas	17	17			83	
	c. Inspektorat	1	1			9	
	d. Sekretariat DPRD	1	1		1	5	
	e. Kantor	3	3			16	
	f. Kecamatan	28	28			107	
	g. RSUD	3	3			18	
	h. BUMD	6		6			
	<b>JUMLAH</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>6</b>		<b>302</b>	

Organisasi PPID SKPD, diketuai oleh Sekretaris untuk lingkup Bidang, Dinas, Inspektorat dan Kecamatan, sedangkan untuk Kantor oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, untuk Sekretariat DPRD dan Direktur RSUD oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Masing-masing atasan langsung dari PPID adalah para Kepala SKPD. Struktur organisasi PPID Kabupaten maupun SKPD meliputi Atasan PPID, Ketua PPID, Sekertaris, Bidang Pengelola Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumen dan Arsip serta Bidang Pengaduan dan Bidang Penyelesaian Sengketa

# Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik



Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan semua aktivitas, merupakan kekuatan tersendiri, serta menjadikan spirit kerja untuk bersinergitas mencapai target kinerja. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro (Kang Yoto-Kang Hartono), memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Hal telah dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media, melalui twitter, Whatapps, layanan on-line, SMS langsung, SMS Radio Malowopati FM, Forum Radio, dialog interaktif/ dialog publik.

Untuk penguatannya, juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik NGO yang ada di Bojonegoro, antara lain Bojonegoro Institut (BI), Institute Development of Society (IDFoS), Sinergantara. Terkait dengan keterbukaan pengelolaan minyak dan gas bumi bersama Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut :

## 1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana PPID di Kabupaten Bojonegoro, terletak pada 2 (dua) tempat, yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro di jalan Ahmad Yani Nomor 4 Bojonegoro dan pada Desk Layanan Informasi PPID di jalan AKBP M. Suroko Nomor 11 Bojonegoro. Berbagai fasilitas tersebut adalah sebagai berikut :

## a. Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten

Layanan PPID Kabupaten, tidak menyatu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bojonegoro, namun disatukan dengan sarana media Center dan berada di Komplek gedung Radio Malowopati FM Bojonegoro, Jalan AKBP M. Suroko Nomor 11 Bojonegoro. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pada Media Center sekaligus sebagai pusat bertemunya dari komunitas jurnalis/ media. Dengan demikian, akan dapat memberikan dukungan langsung terhadap berbagai sinergitas informasi.

Gambar 6

### Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Bojonegoro



Desk layanan informasi PPID Kabupaten dilengkapi dengan ruangan desk layanan informasi PPID Kabupaten berukuran 6 x 8 meter, dilengkapi dengan fasilitas berupa: set ruang tamu/tunggu, kamar mandi, dapur, front desk informasi, 10 unit PC terkoneksi internet, jaringan wifi gratis, 1 (satu) unit scan, 3 (tiga) unit pendingin ruangan, display monitor tv 39", papan informasi, almari dan rak buku, booklet, leaflet, buku-buku seputar PPID, papan struktur organisasi, alur permohonan informasi, alur

keberatan, poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 2 (dua) orang petugas desk layanan informasi dan formulir-formulir hard copy dan digital.

Pada ruang Media Center yang menyartu dengan layanan permohonan informasi dan dokumentasi PPID, juga dilengkapi sarana diskusi untuk para pihak. Disamping itu juga diberikan sarana *free wifi* untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT. Di sisi lain, apabila terdapat pendengar radio Malowopati FM, yang membutuhkan kejelasan informasi, dapat langsung terkoneksi dengan layanan PPID.

Gambar 7

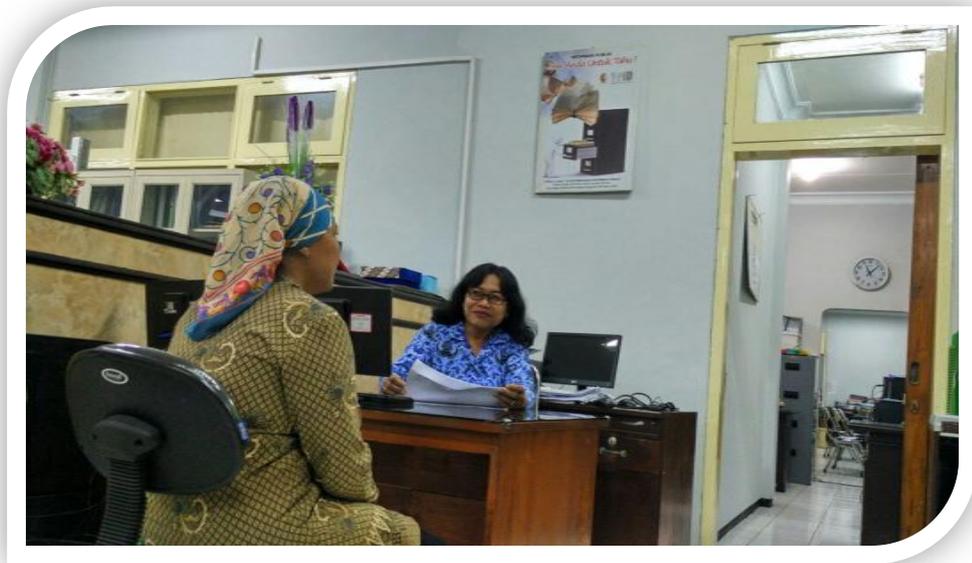
Sarana Penunjang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Bojonegoro



#### **b. Desk Layanan Informasi PPID SKPD.**

Untuk desk layanan informasi pada SKPD, berada pada masing-masing SKPD dengan sarana prasaran penunjang hampir sama dengan sarana prasaran yang ada di PPID Kabupaten. Antara PPID Kabupaten dan PPID SKPD telah terkoneksi dengan jaringan IT dan tersinergi dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID. Beralamat di masing-masing badan SKPD yang terkoneksi dengan PPID Utama melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID.

Gambar 8  
Desk Layanan PPID SKPD Badan PKKD



### c. Desk Layanan Informasi Mobile

Merupakan layanan desk informasi PPID Utama dan SKPD, yang melekat pada kegiatan Dialog Publik setiap Hari Jum'at Pukul 13.00 Wib sampai dengan 15.00 Wib di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Para pemohon informasi, permohonannya dicatat dan ditanggapi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Ketua PPID Utama dan PPID SKPD.

Gambar 9  
Desk Layanan PPID Dialog Publik



Desk layanan informasi mobile, juga dilaksanakan melalui penguatan Keterbukaan Informasi Publik dan pelayanan informasi publik

pada Bulan Pelayanan Publik, yaitu bulan Mei setiap tahunnya di lima lokasi kecamatan. Kegiatan Bulan Pelayanan Publik adalah salah satu inovasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Gambar 10  
Desk Layanan PPID Bulan Layanan Publik



<http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/359/Dekatkan-Pelayanan-Kepada-Masyarakat>

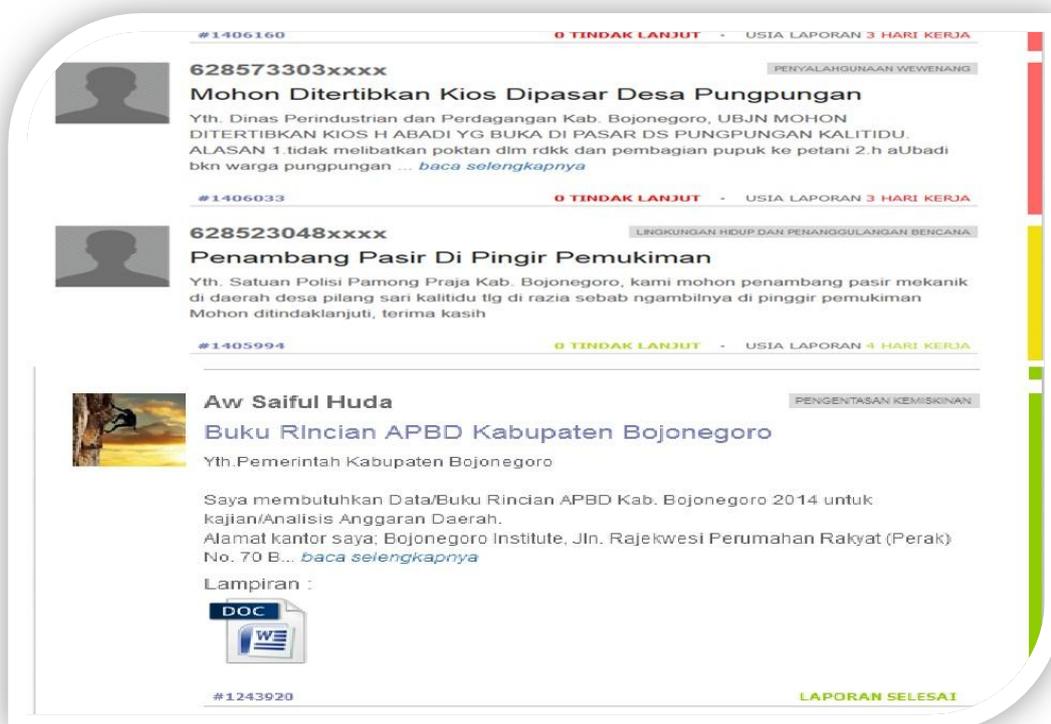
#### d. Desk Layanan Informasi Elektronik

Di era digitalisasi PPID Kabupaten Bojonegoro, juga telah mengembangkan layanan informasi melalui website, baik pada web site Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (<http://www.bojonegorokab.go.id>) dengan sub domain seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (antara lain : <http://bpkkd.bojonegorokab.go.id/>). Khusus untuk informasi layanan PPID pada Website PPID Utama <http://ppid.bojonegorokab.go.id/>.

Layanan lainnya yakni, implementasi aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan On-line Rakyat (**LAPOR!**) yang bekerjasama dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sekarang adalah Kantor Staf Presiden (KSP) pada portal <https://www.lapor.go.id/>. Semua pengaduan masyarakat oleh admin utama maksimal 3 (tiga) hari kerja harus didisposisikan ke SKPD yang membidangi. Selanjutnya SKPD yang membidangi, maksimal 5 (lima) hari kerja harus memberikan tanggapan tindak lanjutnya yang didukung dengan dokumentasi. Apabila SKPD dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak

menindaklanjuti, sistem akan memberikan *early warning* nyala warna “**merah**”. Sebaliknya apabila sudah ada tindak lanjut, akan berubah warna “**kuning atau masih aktif**”. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, apabila pemohon tidak memberikan sanggahan atau sudah merasa tercukupi, maka sistem akan berubah warna menjadi “**hijau**” yang diinterpretasikan “**selesai**”.

Gambar 11  
Desk Layanan PPID LAPOR!



Ada beberapa cara untuk penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR!,

- (a) Menggunakan SMS: ketik Bjn (spasi), isi laporan, kirim SMS ke 1708, lampirkan data dukung (foto, dan lain-lain)
- (b) Menggunakan twitter: login via twitter di [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) , sampaikan laporan di twitter dengan format #LAPOR BJN (spasi), isi laporan, mention @pemkab.bjn
- (c) Menggunakan SMS ke Hallo Bupati nomor : 08113445999

Sarana penyampaian pengaduan melalui aplikasi **LAPOR!** telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, baliho, umbul-umbul, banner dan lain-lain.

Gambar 12  
Publikasi Layanan Informasi



Pada tahun 2015, aplikasi **LAPOR!** telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sarana akses penyampaian informasi yang telah ada dan berkembang di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Semua pengaduan yang berbasis non IT, diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi **LAPOR!**, yakni Sistem Integrasi Aspirasi Publik- Layanan Aspirasi Pengaduan On-line Rakyat (SIAP-LAPOR).

Gambar 13  
Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan-LAPOR!

The screenshot displays the 'LAPOR!' web application interface. The header includes the logo and navigation links like 'BERANDA', 'STATISTIK', 'OPINI KEBIJAKAN', and 'DASHBOARD'. The user is logged in as 'Admin Kab Bjn Km' from 'Pemerintah Kabupaten Bojonegoro'. The main content area shows a sidebar with navigation options like 'Approve', 'Disposisi', 'Pending', 'Arsip', 'Statistik', and 'Notifikasi'. The 'LAPORAN' form is the central focus, with a red box highlighting the 'Isi laporan' field containing the text: 'Inputing pengaduan/ permohonan informasi secara integrasi dari sarana informasi'.

<https://www.lapor.go.id/admin20#>

Hal-hal yang diintegrasikan adalah, semua pengaduan pada whatapps Bupati, pimpinan SKPD, pengaduan pada Radio Malowopati FM nomor Hp : 082143212958, pengaduan melalui twitter, pengaduan melalui group whatapps : kerja cepat tepat manfaat, monitoring keuangan dan pembangunan, sapa keluarga dengan kasih (sagasih), layanan beras keluarga miskin (raslakin), berita jonegoro. Prinsip yang diatur pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013, bahwa semua pengaduan dari masyarakat melalui berbagai saluran informasi, diolah dan diidentifikasi dan dijadikan input dalam perencanaan sekaligus dipilah dan dijadikan ide dalam pembangunan. Salah satunya adalah ide pembangunan jalan dengan paving.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga melakukan kerjasama dengan berita harian Jawa Pos Radar Bojonegoro, yakni terkait dengan berbagai pengaduan, keluhan baik yang langsung dari pembaca melalui twitter Radar Bojonegoro maupun dari wartawan Radar Bojonegoro. Berbagai keluhan, pengaduan tersebut diidentifikasi menjadi bagian permohonan informasi yang diteruskan kepada SKPD terkait. Demikian pula untuk kolom **Mata Radar**, yakni hasil “jepretan dari para jurnalis Radar Bojonegoro” terhadap kondisi sarana prasana umum yang kurang dan tidak layak.

Gambar 14  
Kerjasama Layanan Permohonan Informasi



## 2. Anggaran PPID

Anggaran pelayanan informasi dan kegiatan PPID Kabupaten setiap tahunnya telah dianggarkan, pada penganggaran di Seksi Komunikasi Pemerintah Bidang Jaringan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang pada tahun 2015 sebesar Rp. 386.531.000,-, sebagai berikut :

1. Program kerjasama informasi dengan media massa
  - Penyebar luasan informasi melalui media massa sebesar: Rp. 98.191.000,-
2. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
  - a. Kegiatan : pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, sebesar : Rp. 41.023.500.
  - b. Kegiatan : pengumpulan data dan informasi daerah, sebesar : Rp. 122.611.500.
3. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
  - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, sebesar: Rp. 124.705.000.

Secara rinci terlampir.

Untuk PPID SKPD, penganggarannya diikutkan di Sekretariat masing-masing SKPD yakni pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Sedangkan sebagian sudah memberikan honor pada pengelola PPID SKPD.

### **3. Daftar Informasi publik (DIP)**

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro PPID Kabupaten maupun PPID SKPD/ Pembantu telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website masing-masing Badan Publik. Sampai dengan tahun 2015 DIP yang sudah diupload PPID Kabupaten sejumlah 520 DIP sedangkan dari 68 SKPD yang telah mengupload DIP sejumlah 45 SKPD. Jumlah DIP yang di Upload di website SKPD sebanyak 657 DIP. Dengan demikian jumlah DIP pada PPID Kab Bojonegoro sebanyak : 1177 DIP,

Tabel 3  
Data DIP PPID Kabupaten, SKPD, BUMD, Badan Publik Lain

No.	Uraian	Jumlah PPID	Daftar Informasi Publik				Jumlah DIP
			Berkala	Setiap-saat	Serta Merta	Dikecualikan	
1	PPID Kabupaten	1	√	√	√		520
	<b>PPID SKPD Kantor</b>	<b>3</b>					
2	Kantor Ketahanan Pangan		√				16
3	Kantor Arsip dan Perpustakaan		√	√			5
4	Kantor Satpol PP		√	√	√		5
	<b>PPID SKPD Badan</b>	<b>9</b>					
5	Badan PPKB		√	√			2
6	Badan Kepegawaian Daerah		√	√			18
7	Badan Kesbangpol dan linmas		√	√	√		4
8	Badan Lingkungan Hidup		√	√			4
9	BPMPD		√	√			4
10	Bappeda		√	√			14
11	Badan Perizinan		√	√			14
12	Badan PBD (BPBD)		√	√	√		14
13	Badan PKKD		√	√			3
	<b>PPID SKPD Skretariat DPRD, Inspektorat, KPU</b>						
14	Sekretariat DPRD Kab. Bojonegoro	1	√				3
15	Inspektorat	1	√	√			14
16	Komisi Pemilihan Umum	1	√	√			12
	<b>PPID SKPD Dinas</b>	<b>17</b>					
17	Dinas Pendidikan		√	√			4
18	Dinas Kebersihan dan Pertamanan		√	√			14
19	Dinas Koperasi, dan UKM		√	√			7
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		√	√			32
21	Dinas Pekerjaan Umum		√	√			31
22	Dinas Pendapatan Daerah		√	√			4
23	Dinas Perhubungan		√	√	√		30
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		√	√			5
25	Dinas Pertanian		√	√			5
26	Dinas Peternakan dan Perikanan		√	√			8
27	Dinas Nakertransos		√	√			24
28	Dinas Perhutanan dan Perkebunan		√	√	√		6
29	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√		52
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√	√			1
31	Dinas Pengairan		√	√			1
32	Dinas Kesehatan		√	√			10
33	Dinas ESDM		√	√	√		13

No.	Uraian	Jumlah PPID	Daftar Informasi Publik				Jumlah DIP
			Berkala	Setiap -saat	Serta Merta	Dikecua likan	
	<b>PPID SKPD Kecamatan</b>	28					
34	Kecamatan Balen		√				14
35	Kecamatan Baureno		√				2
36	Kecamatan Bubulan		√	√			1
37	Kecamatan Bojonegoro		√	√			3
38	Kecamatan Kalitidu		√				2
39	Kecamatan Gondang		√	√			14
40	Kecamatan Dander		√	√			14
41	Kecamatan Kanor		√				1
42	Kecamatan Kapas		√	√			14
43	Kecamatan Kasiman		√	√			4
44	Kecamatan Kedewan		√	√			14
45	Kecamatan Kedungadem		√				1
46	Kecamatan Kepohbaru		√	√			14
47	Kecamatan Malo		√	√			14
48	Kecamatan Margomulyo		√	√			14
49	Kecamatan Ngambon		√				1
50	Kecamatan Ngasem		√	√			14
51	Kecamatan Ngraho		√				2
52	Kecamatan Padangan		√				1
53	Kecamatan Purwosari		√	√			31
54	Kecamatan Temayang		√				1
55	Kecamatan Trucuk		√	√			8
56	Kecamatan Tambakrejo		√				1
57	Kecamatan Gayam		√				1
58	Kecamatan Sumberrejo		√	√			8
59	Kecamatan Sukosewu		√	√			1
60	Kecamatan Sugihwaras		√	√			5
61	Kecamatan Sekar		√				1
	<b>PPID RSUD</b>	3					
62	RSUD Bojonegoro		√	√	√		35
63	RSUD Sumberrejo		√	√	√		18
64	RSUD Padangan		√	√	√		6
	<b>PPID BUMD</b>	6					
65	PT. Asli Dharma Sejahtera (ADS)						0
66	PT. (BBS)						0
67	PT. Griya Dharma Kusuma (GDK)		√				1
68	PD. Pasar						0
69	PD. Air Minum (PDAM)		√	√			17
70	PD. (BPR)						0
	<b>Total</b>	<b>70</b>					<b>1.177</b>

Gambar 15  
Layanan Informasi DIP pada Web PPID

The image shows a screenshot of the PPID website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Beranda', 'Profil', 'Layanan Informasi', 'Informasi Publik', 'Laporan PPID', 'Pantau Banjir', 'Galeri', and 'Kontak'. The main heading is 'DAFTAR INFORMASI PUBLIK BOJONEGORO'. Below this, there is a search bar and a table listing various information requests. The table has columns for 'No.', 'Jenis Informasi', 'Ringkasan Informasi', 'Penanggung Jawab', 'Waktu dan Tempat Pembuatan', 'Bentuk Informasi yang Tersedia', 'Secara Berkala', 'Setiap Saat', 'Serta Merta', 'Dikecualikan', 'Jangka Waktu Penyimpanan', and 'Download'. The entries include reports on the performance of various departments like Bakesbangpolinmas, Bappeda, BPMPD, BLH, Inspektorat, BPBD, and DKP.

Below the main list, there is a detailed view of a specific request from the 'DIP' section. The title is 'Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bojonegoro'. It includes a table with the following columns: 'No.', 'Kode', 'Jenis Informasi', 'Ringkasan Informasi', 'Penanggung Jawab', 'Waktu dan Tempat Pembuatan', and 'Bentuk Informasi yang Tersedia'. The table contains 7 entries, each with a unique code and a brief description of the information request.

DIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan

#### 4. Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi di PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari berbagai akses informasi di atas adalah sebanyak 2.034 permohonan, sedangkan dokumen yang dimohon oleh pemohon informasi publik melalui desk PPID diantaranya berupa dokumen Data Realisasi Anggaran Perkegiatan Tahun 2013 dan 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Dokumen SK Tim Perumus DIP PPID Bojonegoro, SOP Pelayanan dan SOP Integrasi, Salinan SK dan DIP Kominfo, Data Soft copy Lembaga Alamat Dan Jumlah Siswa SLTA masing- masing Jurusan tahun ajaran 2014/ 2015, PDRB 2013 dan 2014 dan Bojonegoro Dalam Angka.

Selama tahun 2015 ini, informasi yang paling banyak dimohon melalui saluran layanan informasi desk PPID dan juga melalui saluran layanan SMS Radio Malowopati serta layanan on-line, adalah mengenai pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk saluran layanan desk informasi mobile (dialog publik Jum'at) adalah seputar pemerintahan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 4

Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk

Bulan	Jml Permo honan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Dito lak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Seba gian		Dikecu alikan	Belum Dikuasai	Lain nya
1	2	5	0	0	2	2	0	0
2	2	7	2	0	0	0	0	0
3	5	7	4	0	1	0	0	1
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4	8	4	0	0	0	0	0
11	1	4	0	0	1	1	0	0
12	1	6	1	0	0	0	0	0
<b>JML</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa pemohon informasi sebanyak 15 permohonan, dimana 11 permohonan atau 86% dikabulkan sedangkan 4 permohonan atau 14% ditolak dikarenakan data yang diminta belum terdokumentasi dan belum diaudit oleh BPK, sehingga dokumentasi dikaburkan sejumlah 3 (tiga) dokumentasi dan informasi, serta 1 (satu) permohonan ditolak karena pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan informasi.

Secara rinci permohonan informasi melalui desk layanan permohonan informasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Rincian Pelayanan Informasi pada Desk layanan Permohonan Informasi

No Register	Pemohon	Isi Permohonan	Kegunaan	Status
01/II/PPID/BJN/2015	Link Kontrol	Data realisasi anggaran perkegiatan Dinkes	Diskusi internal lembaga sebagai bahan study banding	Ditolak Dokumentasi Informasi belum terdokumen dan/atau belum di periksa BPK
02/II/PPID/BJN/2015	Link Kontrol	Data realisasi anggaran perkegiatan Dispendik	Diskusi internal lembaga sebagai bahan study banding	Ditolak Dokumentasi Informasi belum terdokumen dan/atau belum di periksa BPK
03/III/PPID/BJN/2015	Herlina	Info potensi lokal kabupaten Bojonegoro	Untuk keperluan data kerja lapangan	Terpenuhi
04/III/PPID/BJN/2015	Bojonegoro Institute	Jumlah pemohon informasi dari desk PPID , SMS Malowopati dan LAPOR	Pengkayaan data dan bahan diskusi	Terpenuhi
05/III/PPID/BJN/2015	Bojonegoro Institute	Rekapitulasi LAPOR	Pengkayaan data dan bahan diskusi	Terpenuhi
06/III/PPID/BJN/2015	Bojonegoro Institute	1. Dokumen SK TIM Perumus DIP 2. SOP Pelayanan dan SOP Integrasi PPID 3. Salinan SK dan SIP Utama dan Kominfo	Pengkayaan data dan bahan diskusi	Terpenuhi
07/III/PPID/BJN/2015	Bojonegoro Institute	PDRB 2013 dan 2014 dan File Bojonegoro Dalam Angka 2014	Pengkayaan data dan bahan diskusi	Terpenuhi
08/III/PPID/BJN/2015	LSM Young	Data Realisasi Anggaran 2013		Ditolak Meningkat tidak memenuhi persyaratan permohonan informasi
09/III/PPID/BJN/2015	Shodikin	Sata lembaga Alamat dan Jumlah Siswa SLTA masing-masing jurusan TA 2014/2015	Pemenuhan data keanggotaan SPR RI	Terpenuhi
10/X/PPID/BJN/2015	Sri Hamto	Kandungan mineral batu onxy/marmer	Pengeboran sumur dan pemertiban penambang	Terpenuhi
11/X/PPID/BJN/2015	Sahal	Data pemberhentian pengajar dari BKD	Honorer GTT mendapat perhatian	Terpenuhi

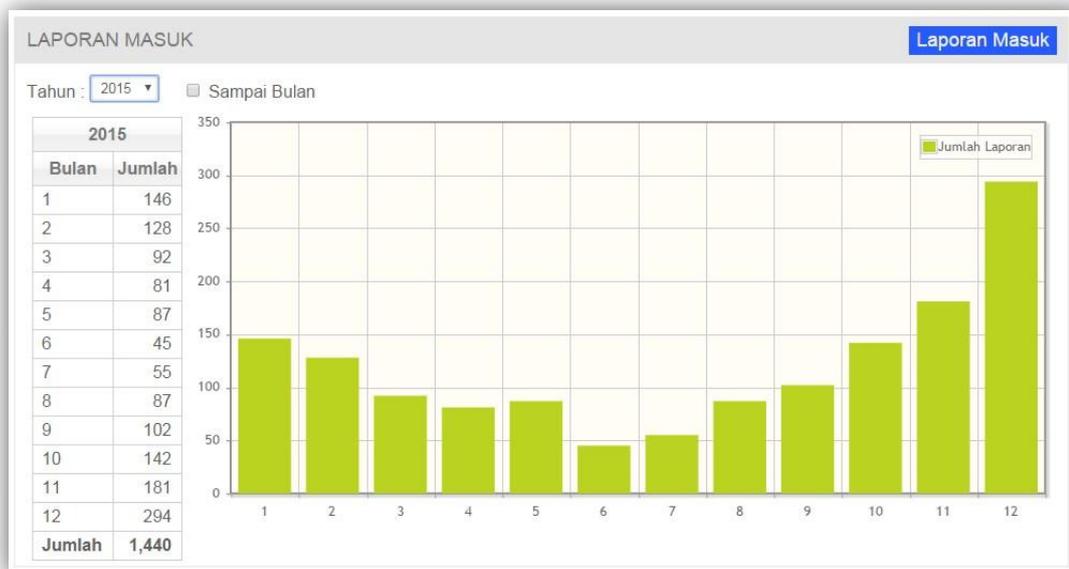
No Register	Pemohon	Isi Permohonan	Kegunaan	Status
12/X/PPID/BJ N/2015	Kiki Aprilia P	1. Copy SK Web 2. Salinan Uji Kosekuensi 3. Salinan DPA	Bahan percontohan kegiatan pemkab tuban	Terpenuhi
13/X/PPID/BJ N/2015	Mona Luthfina Usmani	Rekapitulasi SMS Radio Malowopati bulan April 2015	Penelitian data sekunder	Terpenuhi
14/XI/PPID/BJ N/2015	Link Kontrol	Data realisasi anggaran perkegiatan Disbudpar tahun 2015	Bahan studi banding peningkatan pariwisata Bojonegoro	Ditolak Dokumentasi Informasi belum terdokumen dan/atau belum di periksa BPK
15/XII/PPID/BJ N/2015	Imam Sugiantoro	Data sisa hasil beacukai yang disosialisasikan lewat pokmas	Pembelajaran dan peningkatan cukan di Bojonegoro	Terpenuhi

Berdasarkan Tabel 5 diatas maka pemohon informasi melalui desk layanan informasi dapat dijelaskan 9 (Sembilan ) atau 53% pemohon informasi berasal dari NGO atau CSO, sedangkan 7 (tujuh ) atau 47 % pemohon informasi berasal dari perseorangan / individu dan dapat disimpulkan data yang dimohon 50% dipergunakan untuk pengkayaan data dan 50% untuk bahan pembelajaran.

Selanjutnya terkait dengan permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan On-line Rakyat (**LAPOR!**), sebanyak 1.440 permohonan. Permohonan tersebut semuanya dikabulkan atau ditindak lanjuti oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana data statistik dari aplikasi **LAPOR!**, sebagai berikut:

Gambar 16

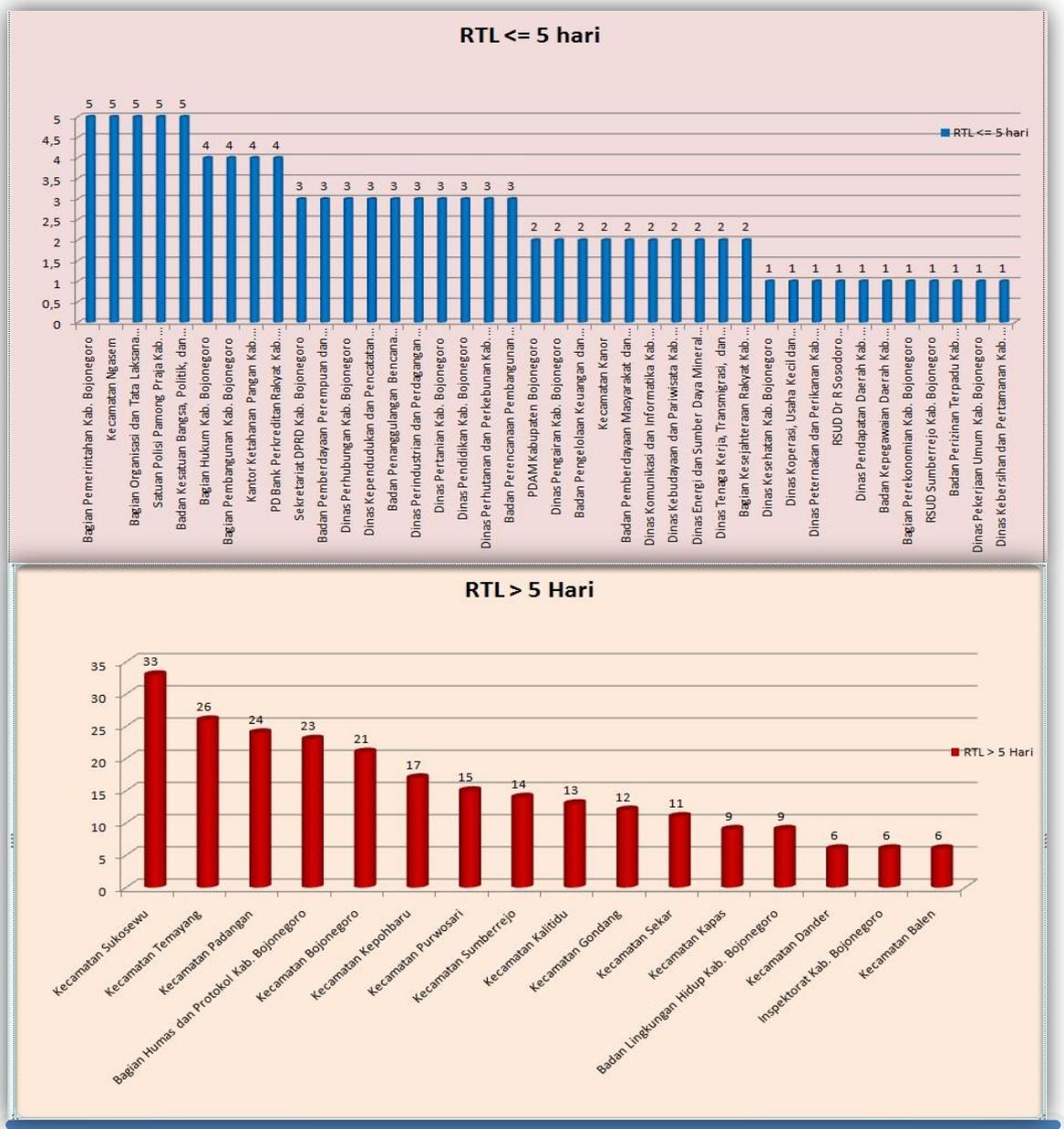
### Layanan Permohonan Informasi Melalui **LAPOR!**



Rata-rata laju tindak lanjut terhadap berbagai permohonan informasi dari Admin Kabupaten ke SKPD adalah 3,46 hari kerja. Sedangkan tindak lanjut dari SKPD, rata-rata adalah 2,89 hari kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik, yang setiap hari Jum'at dilaporkan oleh Ketua PPID kepada Bupati yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD dalam Rapat Evaluasi Kinerja.

Gambar 17

Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui LAPOR!





Permohonan informasi melalui Radio Malowopati FM sebanyak 324 pemohon, yang semuanya telah diberikan jawaban dan ditindaklanjuti secara penuh. Pada akhir tahun 2015, untuk memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat, telah dikembangkan acara Ayo Mas Bro (Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif) mulai pukul 08.00-09.30, dimana secara bergiliran Kepala SKPD menyampaikan program dan informasi yang dikelola oleh SKPD secara on-air kepada masyarakat. Masyarakat Bojonegoro/pendengar radio Malowopati diberikan keleluasaan untuk mengajukan permohonan informasi terhadap SKPD narasumber, dengan menghubungi on-line nomor HP : 082143212958.

Topik layanan informasi melalui SMS Radio Malowopati yang paling banyak dimohon : tentang pemerintahan 40%, pelayanan publik 25%, kesehatan 15%, pendidikan 5%, ketenagakerjaan 5%, lain-lain 10%

Gambar 19

Kabag Perekonomian On-Air AYO MAS BRO



Desk layanan informasi melalui Dialog interatif/ Dialog Publik Jum'at, sebanyak 225 permohonan informasi yang semuanya telah dijawab dan ditindaklanjuti. Topik layanan informasi pada Dialog Publik tahun 2015 adalah : Pemerintahan 21%, pekerjaan umum 12%, pendidikan 9%, perhubungan 9%, social 8%, pertanian 7%, dan lain-lain 44% meliputi kesehatan, pengairan, informatika, Kebudayaan, Pertanahan, Peternakan

Perikanan, Kepegawaian, Lingkungan Hidup, ESDM, Perdagangan, Perindustrian, Kependudukan Capil, Kehutanan/ Perkebunan, Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi UKM, Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan dialog publik yang dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2008 hingga sekarang, disiarkan secara on-air pada Radio Malowopati 95,8 FM dan Radio Madani 125,5 FM. Pada tahun 2016, pelaksanaan dialog publik juga telah dikembangkan dengan streaming pada youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=-C2ioKHCHQY> (edisi 11 Maret 2016)

## **5. Sengketa Informasi Publik**

Sampai dengan tahun 2015 seluruh pemohon informasi baik secara langsung, online maupun melalui saluran lain telah terlayani secara maksimal. Terkait dengan sengketa informasi pada PPID Kabupaten Bojonegoro belum pernah ada sengketa oleh PPID Utama maupun PPID SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



# Kendala dan Pengembangan

Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan, bukan merupakan hal yang diharapkan, tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Bercermin dari kendala dan kelemahan, dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Oleh karena itu, pada uraian ini, berbagai kendala dan kelemahan dijadikan dasar untuk pengembangan dan inovasi.

## 1. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bojonegoro, antara lain :

- a. Terbatasnya personil yang kompeten terkait keterbukaan informasi publik
- b. Belum seluruh SKPD/ Badan Publik komitmen terhadap keterbukaan informasi publik
- c. Belum semua SKPD/ Badan Publik, tersedia desk layanan informasi
- d. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali
- e. Belum optimalnya pengelolaan informasi berbasis IT serta terbatasnya personil yang berkompenten di bidang IT
- f. Masih belum terpahamkannya hak dan kewajiban publik terhadap keterbukaan informasi, sehingga masih adanya persepsi pemanfaat informasi belum sesuai dengan ketentuan bagi para pemohon
- g. Adanya permohonan informasi yang berulang

## 2. Pengembangan/ Inovasi

Dalam upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, PPID Bojonegoro telah melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa stakeholder/ mitra profesi, antara lain:

- a. Media cetak Radar Bojonegoro, yakni terkait berbagai informasi masyarakat yang menjadi headline pemberitaan sekaligus permohonan informasi melalui “twitter” dan “mata radar” dalam mekanisme keterbukaan informasi publik.
- b. CSO Bojonegoro Institute, yakni Nota Kerjasama kesepahaman antara Bupati Bojonegoro dengan CSO Bojonegoro Institute tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yang salah satunya memberikan pendampingan penguatan PPID SKPD.

Gambar 20

### MOU Bupati Bojonegoro dengan CSO Bojonegoro Institute



- c. Forum Radio Bojonegoro (12 Radio) tentang akses saluran informasi masyarakat melalui media radio. Para pengelola radio yang tergabung dalam Forum Radio Bojonegoro, diberikan keleluasaan untuk menghimpun berbagai aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan/mengemas penyampaian aspirasi tersebut sesuai style dari radio masing-masing,
- d. Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT, yaitu dengan masing-masing KIM membuat blog. Melalui blog KIM tersebut, dapat dipublikasikan berbagai potensi dan kegiatan pemerintahan desa, termasuk publikasi pemanfaatan dan penggunaan anggaran desa. Hingga saat sekarang telah terbentuk sejumlah 68 blog KIM.
- e. Pembangunan web desa (webdes) dengan domain desa (nama desa.id), salah satunya adalah desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo <http://pejambon-bjn.desa.id/transparansi-desa/>. Hingga saat sekarang sudah terbangun 68 webdes (tahun 2015 ada 42 webdesa). Secara bertahap di tahun 2016 dilanjutkan dan telah dilakukan launching web des di seluruh wilayah Kecamatan Sumberrejo.
- f. SIAP LAPOR! SIAP LAPOR! adalah Sistem Integrasi Aspirasi Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yakni seluruh layanan informasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro baik melalui Dialog Publik, SMS Malowopati, Desk PPID maupun media layanan lainnya di integrasikan dalam aplikasi LAPOR, sehingga aduan, saran, kritik, permohonan informasi yang belum dijawab/ditindak lanjuti/dikabulkan akan teridentifikasi dengan jelas melalui aplikasi ini. Setiap jum'at pagi, responsibilitas Badan Publik terhadap layanan informasi secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Bupati bersama-sama Kepala SKPD.
- g. Aplikasi Gerakan Desa Sehat Dan Cerdas (GDSC) Merupakan revolusi data yang akan dikembangkan ditahun 2016 yakni pendataan detail di tingkat Dasawisma Desa, dalam pelaksanaannya melibatkan peran

masyarakat/PKK Desa tingkat Dasawisma. Data GDSC ini merupakan data dasar terdiri dari 298 kolom yang menjelaskan dari indikator Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) meliputi 20 (dua puluh) indikator. Dengan terumuskannya data dasar desa, maka kebutuhan data dan informasi bagi masyarakat pemohon informasi akan secara cepat dapat terpenuhi.

h. Aplikasi data Game My Vilagge Merupakan aplikasi data berbasis 3 dimensi, dimana masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat secara langsung mengimplementasikan ke dalam mekanisme aplikasi dimaksud. Disamping itu, data dasar desa akan di-link-kan ke dalam aplikasi tersebut. Aplikasi ini dikembangkan oleh NGO Sinergantara yang memenangkan kompetisi keterbukaan informasi publik dan disampaikan pada Konferensi Open Government Indonesia di Bali tahun 2014.

i. Pada akhir tahun 2015, Kabupaten Bojonegoro, menjadi salah satu nominasi Keterbukaan Informasi Publik pada kegiatan open Governmen Indonesia (OGI) dan pada tahun 2016 diikutkan ke dalam kompetisi pada Open Government Partnership (OGP).

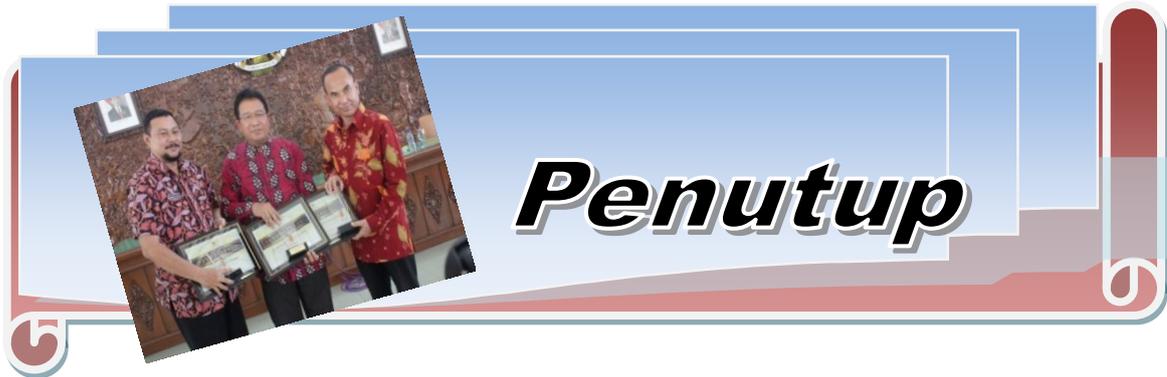


### 3. Rencana Tindak/ Target Tahun 2016

Rencana Aksi Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 disamping penguatan SDM melalui pelatihan bagi PPID SKPD yang direncanakan diselenggarakan oleh BKD, juga memasukan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik SKPD dalam rencana aksi SKPD di aplikasi SISMON (Sistem Monitoring) yang mana aplikasi tersebut dikelola oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Aplikasi SISMON ini merupakan tools bagi SKPD untuk menilai apakah pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan searah dan sudah terlaksana sesuai jadwal rencana aksi.

Direncanakan pula, melaksanakan penguatan KIP melalui aktivasi website desa dan revolusi data GDSC di tingkat Dasawisma Desa bekerjasama dengan Tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, dengan target, terbentuknya KIM berbasis IT pada 419 Desa. Disamping itu, secara bersamaan dikembangkan webdes pada seluruh desa, sebagai embrio keterbukaan informasi desa.

Menyusun Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintahan, sebagai bagian keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Open Government Indonesia (OGI) tahun 2016-2017 dan sekaligus sebagai role model Open Government Indonesia (OGI).



Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2015, PPID Kabupaten Bojonegoro, yang dalam ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika bersama instansi terkait, telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Beberapa kegiatan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

1. Kategori Kabupaten Terbaik II pada PPID Award KIP Provinsi Jatim Tahun 2015
2. Kategori Kabupaten Terinovasi pada PPID Award KIP Provinsi Jatim Tahun 2015.
3. Kategori Kabupaten Laporan Tahunan Terbaik pada PPID Award KIP Provinsi Jatim Tahun 2015
4. Nominator Kategori Meja Layanan Terbaik Kabupaten pada PPID Award KIP Provinsi Jatim Tahun 2015
5. Nominator Pemerintahan Terbuka dari Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI)

Demikianlah Laporan Tahunan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2015, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencapai Open Government, good and clean Government.

# DOKUMEN



Penerimaan Penghargaan PPID Award KIPJATIM Tahun 2015  
Oleh Atasan PPID Kab. Bojonegoro



Penyerahan Penghargaan PPID Award KIP Jatim tahun 2015  
oleh Ketua PPID Kab. Bojonegoro kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati  
Bojonegoro



LCCK KIM berbasis IT, Keterbukaan Informasi Desa, di desa Sedahkidul Kec Purwosari



Penguatan Keterbukaan Informasi Publik kepada Pengelola Web des di Kecamatan Kasiman

Penguatan PPID  
SKPD  
se Kabupaten  
Bojonegoro



Work Shop  
Pemutakhiran DIP  
dan Aplikasi SIP  
PPID pada PPID  
SKPD



Rapat koordinasi Pembahasan Permohonan Informasi



Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dengan Jurnalis Komunitas Forum Radio Bojonegoro, Forum KIM Bojonegoro, BLOGGER dan RTIK

Layanan Informasi Publik dalam Pekan Pelayanan Publik



Diskusi dengan Tim Peneliti tentang Implementasi aplikasi LAPOR! dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Jakarta

# LINK PEMBERITAAN On-LINE

- [http://www.beritajatim.com/berita\\_migas/240806/eiti : transparansi migas masih sulit diterapkan.html](http://www.beritajatim.com/berita_migas/240806/eiti : transparansi migas masih sulit diterapkan.html)
- <http://eksposa.com/?p=1518>
- <http://www.idfos.or.id/serdhana-dan-menunjukkan-ciri-khas-bojonegoro/>
- <http://kanalbojonegoro.com/ppid-bi-gelar-diskusi-evaluasi-pelayanan-informasi-publik/>
- <http://infopublik.id/read/115551/ppid-bojonegoro-sosialisasikan-kip-melalui-media-film.html>
- <http://kimmaherjaya.blogspot.co.id/2015/06/pengelola-ppid-skpd-dilatih.html>
- <http://rrcindonesia.com/2015/03/30/forum-evaluasi-pelayanan-informasi-publik-ppid-skpd/>
- <https://www.facebook.com/MediaCenterBJN/posts/864310993581103>